



Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba

Effectiveness of Village Fund Management of Direct Cash Transfer (BLT) Program in Improving Welfare in Lumban Purba Village

Royani Silaban, Adam & Marlina Deliana

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Manajemen dana desa dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lumban Purba adalah sebuah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi, terutama setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa dalam program BLT dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Lumban Purba, sambil juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teori efektivitas Duncam digunakan dengan indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, kepala dusun, bendahara desa, serta masyarakat penerima dan non-penerima BLT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun integrasi program sudah berjalan efektif, pencapaian tujuan masih belum optimal karena kesalahan dalam penyaluran bantuan, dan adaptasi program belum efektif karena tidak adanya revisi data selama pelaksanaan program. Faktor penghambatnya meliputi kurangnya sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan ketidakakuratan data yang disebabkan oleh kurangnya revisi data secara rutin.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa Program BLT, Kesejahteraan

Abstract

Village fund management in the Direct Cash Transfer (BLT) program in Lumban Purba Village is a policy that aims to provide assistance to economically affected poor people, especially after the COVID-19 pandemic. This study aims to evaluate the effectiveness of village fund management in the BLT program in improving welfare in Lumban Purba Village, while also identifying inhibiting factors. The research method used is qualitative with a descriptive approach, involving data collection techniques such as observation, interviews, documentation, and triangulation. Duncam's theory of effectiveness is used with indicators of goal achievement, integration, and adaptation. Research informants include village heads, hamlet heads, village treasurers, as well as BLT recipient and non-recipient communities. The results showed that even though program integration has been effective, the achievement of goals is still not optimal due to errors in aid distribution, and program adaptation has not been effective due to the absence of data revisions during program implementation. Inhibiting factors include the lack of means to convey people's aspirations and data inaccuracies caused by the lack of regular data revisions.

Keywords: Effectiveness, BLT Program Village Fund Management, welfare.

How to Cite: Silaban, R., Adam & Deliana M. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 6(1) 2024: 23-28



PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan tujuan dari pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi selama dalam masa periode jabatannya dalam memimpin suatu wilayah. Menjadi pemerintah yang baik hendaknya memberikan kinerja yang nyata melalui program-program yang diselenggarakan (Putri et al., 2019). Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya, hal ini dijelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (Sinaga et al., 2019). Desa merupakan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan yang menitikberatkan pada pembangunan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. UU No 6 Tahun 2014 menjelaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Chairi et al., 2019). Untuk membentuk perkembangan dan pembangunan masyarakat desa pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan mengeluarkan Dana Desa (DD) (Dea et al., 2022).

Dana desa yang bersumber dari APBN akan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota (Setiawan et al., 2022). Penerimaan DD akan dikelola oleh desa dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, disiplin dan tanggung jawab. Desa Lumban Purba merupakan salah satu desa yang menerima dana desa. Salah satu wujud pengelolaan dana desa dalam kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Desa Lumban Purba berada di wilayah Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki 3 dusun dan dengan jumlah penduduk masyarakat yang tercatat di kantor desa sebanyak 1559 orang. Sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani, wiraswasta, supir, buruh, dan lain sebagainya. Melihat kondisi ekonomi masyarakat BLT DD memang berpengaruh dalam membantu masyarakat. BLT adalah bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat miskin berupa uang tunai bersifat bebas pajak, yang tujuannya untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Berdasarkan pasal 33 ayat (5) PMK 2021 penyaluran BLT adalah sebesar 40% dari pagu DD maka besaran jumlah uang yang diterima oleh masyarakat adalah Rp. 300.000 setiap bulannya dimulai sejak Januari 2022 hingga Desember 2022. BLT DD sasaran utamanya adalah penduduk miskin yang tidak menerima bantuan PKH/BPNT, masyarakat yang kehilangan pekerjaan termasuk setelah mengalami dampak pandemic Covid-19 dua tahun lalu, masyarakat yang memiliki anggota keluarga penderita penyakit menahun/kronis, serta penyandang disabilitas (R. E. Saputra et al., 2022). Efektivitas adalah sebuah tolak ukur keberhasilan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Zulianda et al., 2020). Dalam mencapai efektivitas program BLT yang berisi harapan dan tujuan saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka dapat diukur dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Steers, 1985).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Efektivitas pengelolaan dana desa program BLT dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lumban Purba. Pertanyaan penelitian meliputi bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa program BLT dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Lumban Purba, serta faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam efektivitas pengelolaan dana desa tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi program BLT di tingkat desa serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yang artinya penelitian digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2018).

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Lumban Purba, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, mulai bulan Desember 2022 hingga Januari 2023, selama satu bulan. Informan penelitian terdiri dari beberapa jenis, yakni informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci adalah kepala Desa Lumban Purba, sedangkan informan utama meliputi kepala dusun 1-3 dan bendahara desa. Sementara itu, informan tambahan terdiri dari masyarakat penerima dan tidak penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder, dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk memastikan keakuratan dan kevalidan data yang terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa program BLT dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Desa Lumban Purba adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 2,335,33 km². Desa Lumban Purba adalah salah satu desa yang mendapatkan dana desa dari pemerintah, dalam pengelolaannya berdasarkan anggaran dana desa yang sudah ditetapkan bahwa dana tersebut akan diperuntukkan sebanyak 40% untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhannya. Program BLT ini merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat yang berketepatan pada saat itu adalah situasi pandemi Covid-19, namun pada penelitian yang peneliti lakukan adalah penyaluran BLT pasca Covid-19. Berdasarkan pasal 33 ayat (5) PMK tahun 2021 dalam program penyaluran BLT adalah sebesar 40 % dari pagu dana desa maka besaran jumlah uang yang diterima oleh masyarakat adalah Rp. 300.000.

Pemerintah Desa Lumban Purba menyalurkan bantuan dana desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 78 KK dengan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan mulai tanggal 24 desember 2022, peneliti melihat bahwa masyarakat penerima BLT adalah masyarakat yang memiliki perekonomian rendah, pekerjaan yang tidak tetap, atau disebut dengan masyarakat dengan kondisi miskin ekstrim.

Menurut Duncam dalam buku Steers (Steers, 1985) mengatakan efektivitas menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang sudah tercapai. Efektivitas suatu program dapat tercapai tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing orang dalam melakukan tujuannya. Jika sasaran dapat tercapai dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian kemampuan untuk menyampaikan target pelayanan publik dengan baik maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Adapun indikator yang peneliti lakukan dalam mengukur tingkat efektivitas pengelolaan BLT DD menurut Menurut Duncam dalam buku Steers yaitu:

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya mencapai tujuan harus dipandang sebagai suatu proses (Luh et al., 2020). Dalam pencapaian tujuan akhir agar terjamin maka diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagian maupun pentahapan dalam arti peoriditasnya (Anastacia et al., 2021). Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan pengelolaan dana desa program BLT penyalurannya dilaksanakan berdasarkan data-data masyarakat yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 33 ayat (5) PMK tahun 2021 penyaluran BLT adalah sebesar 40 %.

Dari aspek sasaran pemberian BLT DD adalah masyarakat miskin ekstrem yang berpenghasilan rendah, masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, masyarakat yang memiliki keluarga rentan sakit menahun/kronis serta masyarakat penyandang disabilitas. Namun setelah penelitian ini dilakukan, peneliti menemukan terdapat kesalahan dalam penyalurannya, memang benar dalam penyalurannya sesuai dengan kriteria, akan tetapi terdapat masyarakat yang seharusnya lebih layak mendapatkan bantuan tersebut namun tidak menerima bantuan, mengakibatkan masyarakat merasa kecewa, ini berarti bahwa program BLT DD di Desa Lumban Purba belum efektif dalam pencapaian tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data masyarakat miskin yang tidak tersalurkan dengan rata dan juga jumlah anggaran dana yang terbatas yaitu 40%.

b. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi atau instansi dalam melaksanakan kegiatan di suatu program kerja yang sudah disepakati dengan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain (Mawasti & Amalia, 2022). Integrasi terdiri dari proses sosialisasi, penggunaan sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan program, dan pengawasan atau pengendalian (D. A. D. Saputra et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dalam pelaksanaan program BLT DD dikerjakan oleh perangkat desa dan dibantu oleh pendamping desa yaitu BPD. Sebelum BLT DD dilakukan pemerintah desa bersama BPD telah melakukan integrasi atau sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di kantor kepala desa. Bentuk sosialisasi yang diterapkan adalah untuk memberikan informasi mengenai tujuan utama penyaluran bantuan langsung tunai, mulai dari kriteria penerima bantuan, proses pengadministrasian hingga tahap penyaluran bantuan serta nominal uang yang akan diterima oleh Masyarakat (Hidayat et al., 2022). Dengan begitu masyarakat akan memahami penggunaan bantuan yang diberikan pemerintah (Sinaga et al., 2019). Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam indikator integrasi sudah efektif pelaksanaannya. Peran pemerintah dalam membantu masyarakat miskin melalui program BLT DD yang sudah terlaksana di Desa Lumban Purba dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. BPD yang ikut serta mendampingi perangkat desa dapat memudahkan dalam pelaksanaan program tersebut.

c. Adaptasi

Adaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan (Mulyaningsih et al., 2023). Strategi pelaksanaan program dapat diukur dengan proses pengadaan pembaharuan dengan kebutuhan termasuk di dalamnya pembaharuan sumber daya manusia yang dimiliki. Pengadaptasian terhadap suatu program yang sedang berjalan memerlukan rasa tanggungjawab dan kerjasama agar berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dalam bentuk adaptasi pengelolaan data masyarakat penerima bantuan ataupun tidak menerima bantuan masyarakat tidak dilakukan lagi penyesuaian atau revisi ulang terkait data tersebut, karena data yang terkumpul akan disimpan dalam dokumen sebagai bukti terlaksananya program BLT DD di Desa Lumban Purba. Akan tetapi jika ada masyarakat yang pindah atau meninggal akan dilakukan revisi data kembali, namun tidak berpengaruh terhadap masyarakat yang sudah ditetapkan terlebih dahulu menjadi penerima BLT DD. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa program BLT di Desa Lumban Purba pada indikator adaptasi tidak berjalan dengan efektif. Tidak ada dilakukan revisi ulang terkait data masyarakat penerima dan tidak menerima bantuan langsung tunai.

Faktor penghambat dan pendukung efektivitas pengelolaan dana desa program BLT dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pengelolaan BLT DD oleh pemerintah Desa Lumban Purba mulai dari awal program diselenggarakan hingga ketahap penyaluran bantuan sudah dipersiapkan secara matang dan didampingi oleh tim pendamping desa yaitu BPD, oleh karena itu semuanya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti keberadaan BLT ini sangat membawa pengaruh positif bagi masyarakat miskin walaupun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, akan

tetapi dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat mulai dari pemenuhan kebutuhan anak di sekolah, pemenuhan kebutuhan dapur dan masih banyak lagi.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan dalam efektivitas pengelolaan dana desa Program BLT di Desa Lumban Purba, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, sasaran dalam penyaluran BLT belum terlaksana dengan baik, menyebabkan masyarakat yang seharusnya lebih layak mendapatkan bantuan tidak menerimanya. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena adanya perasaan ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Misalnya, keluarga-keluarga yang memang membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya, sementara keluarga lain yang mungkin tidak begitu membutuhkan justru mendapatkan bantuan tersebut. Akibatnya, terjadi ketegangan sosial dan peningkatan ketidakpercayaan terhadap pemerintah setempat.

Kedua, pembaharuan atau revisi data mengenai masyarakat penerima bantuan tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya, dengan melakukan revisi data secara berkala, program BLT dapat tersalurkan secara lebih merata kepada masyarakat yang membutuhkannya. Tanpa adanya pembaruan data yang teratur, kemungkinan terjadinya penyaluran bantuan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat atau sebaliknya, tidak mendapatkan bantuan meskipun sebenarnya berhak, menjadi masalah yang tidak terhindarkan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program tersebut.

Ketiga, ketiadaan sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat menyebabkan beberapa individu lebih memilih untuk tidak berbicara. Kekhawatiran akan terjadi kesalahpahaman atau tidak adanya respons dari pemerintah dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarkan masalah dan kebutuhan mereka. Faktanya, ketidakmampuan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan secara efektif kepada pihak yang berwenang dapat menyebabkan berlarut-larutnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini bisa berakibat pada munculnya ketidakpuasan yang lebih luas dan mengganggu stabilitas sosial di Desa Lumban Purba.

Hambatan-hambatan tersebut menjadi kendala yang perlu diatasi agar program BLT dapat berjalan lebih efektif dan merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lumban Purba. Diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dan terarah dari pemerintah desa serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengelolaan dan evaluasi program tersebut. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pelaksanaan Program BLT di Desa Lumban Purba dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih adil bagi semua warga masyarakat yang membutuhkannya.

SIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa untuk program BLT di Desa Lumban Purba memiliki keberhasilan dalam integrasi dengan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Namun, terdapat kekurangan dalam pencapaian tujuan dan adaptasi. Meskipun kriteria penerima telah ditetapkan, ada masyarakat yang seharusnya lebih layak namun tidak mendapatkan bantuan, menunjukkan kurangnya efektivitas dalam mencapai tujuan. Selain itu, pengelolaan data penerima tidak melakukan revisi secara berkala, mengindikasikan kurangnya adaptasi terhadap perubahan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima BLT.

Pengelolaan BLT di Desa Lumban Purba didukung oleh persiapan matang dan didampingi oleh tim pendamping desa, BPD, sehingga program berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Meskipun demikian, terdapat hambatan yang perlu diatasi. Penyaluran BLT belum efektif, menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan dan meningkatkan ketegangan sosial. Kurangnya pembaharuan data penerima bantuan juga menyebabkan ketidakmerataan dalam penyaluran dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, ketiadaan sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat menghambat partisipasi aktif, yang dapat mengganggu stabilitas sosial di Desa Lumban Purba.

Diperlukan langkah proaktif dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga diharapkan Program BLT dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan merata bagi seluruh warga masyarakat yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastacia, D., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2021). Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berbasis Kebutuhan The Role of Motivation in Improving Employee Performance Based on Requirements. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(September), 176–184. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.748>
- Chairi, Z., Aflah, & Maharany, U. (2019). Aspek Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket terhadap Toko Tradisional di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2).
- Dea, S., Ginting, A., Suharyanto, A., & Batubara, B. M. (2022). Evaluasi Penyaluran Program Anggaran Dana Desa Di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinam Kabupaten Dairi. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 46–55. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1183>
- Hidayat, A., Kusmanto, H., & Ridho, H. (2022). Analisis Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Covid-19. *Perspektif*, 11(3), 1105–1118. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6444>
- Luh, N., Rita, P., & Budiana, I. N. (2020). *Menguji Taji Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Test the Spurs of Implementation of the Policy for Providing Grant Assistance to Community Groups in Badung Regency*. 9(1), 100–110.
- Mawasti, W., & Amalia, R. R. (2022). Integrasi Pendekatan Masalah Sosial dan Aset Komunitas Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Era 4.0. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1735–1745. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.946>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyaningsih, H., Sentosa, B., & Haryanto, D. (2023). *Madura Culinary Entities Shift: Cultural Adaptation and Local Culinary Traditions to Commercialization*. 12(3), 1014–1021. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9122>
- Putri, R. D., Kadir, A., & Nasution, I. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT . Telkom Regional 1 Sumatera Implementation of Early Pension Program Policy in PT . Telkom Regional 1 Sumatera. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 106–111.
- Saputra, D. A. D., Kismartini, K., Dwimawanti, I. H., & Afrizal, T. (2022). Mewujudkan Semarang Hebat melalui Smart City (Studi Kasus pada Dimensi Smart Economy Kota Semarang). *Perspektif*, 11(3), 1043–1049. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6273>
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 4(2), 157–163.
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDPTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718–734. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Sinaga, M., Tarigan, U., & Dewi, R. (2019). Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Perspektif*, 7(2), 46. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i2.2528>
- Steers, M. R. (1985). *Company Organizational Effectiveness*. Jakarta: Erlangga.
- Zulianda, W., Muda, I., & Jamil, B. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di TK Dewantara Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Effectiveness of Curriculum Implementation to Improve Quality of Education in Dewantara Kindergarten, Titi Kuning, Medan Johor Dis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 106–111.